

Halaman 3 Lingkungan

Dilema Pelestarian Lingkungan (*Earth Hour*) dan Keberlangsungan Agenda Nasional 2019



Halaman 3 Kegiatan Sekretariat Jakarta Berketahanan

Seminar *Water as Leverage* - Menuju Semarang Tangguh melalui Pengelolaan Air Terpadu



Selayang Pandang

Sekretariat Jakarta Berketahanan

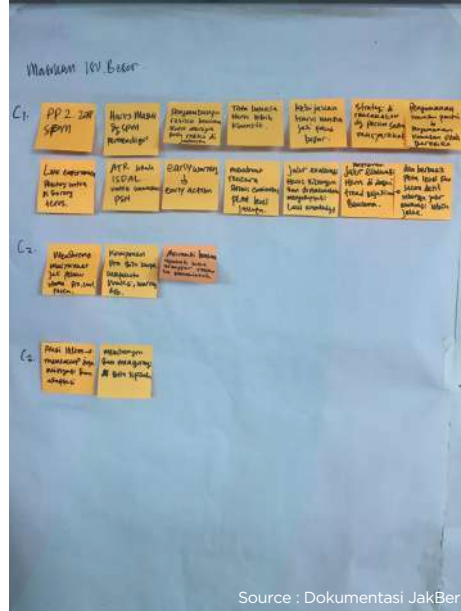
Sekretariat Jakarta Berketahanan terbentuk pada 6 September 2017, Sekretariat Jakarta Berketahanan hadir untuk membantu Koordinator Ketahanan Kota/Chief Resilience Officer (CRO) dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota berketahanan”

Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota Berketahanan, terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dilalui oleh DKI Jakarta. Tahap I, Membentuk Dasar untuk Membangun Ketahanan Kota dengan menyusun Penilaian Awal Ketahanan/Preliminary Resilience Assessment (PRA). Tahap II, Analisis Peluang dan Kemitraan melalui penyusunan strategi (*Developing Resilience Strategy*). Tahap III, Kemitraan dan Implementasi (*Partnerships and Implementation*).

Saat ini, Jakarta telah memasuki Tahap II. Jika tahap I berfokus pada memotret kondisi ketahanan eksisting atau disebut Penilaian Awal Ketahanan, Tahap II lebih fokus pada Perumusan Strategi Ketahanan. Seluruh rangkaian kegiatan Program Jakarta Berketahanan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di DKI Jakarta.



Source : Dokumentasi JakBer



Source : Dokumentasi JakBer

FGD Implementasi Panduan Praktis New Urban Agenda Di DKI Jakarta

Sekretariat Jakarta Berketahanan bekerja sama dengan Ruang Waktu, Yayasan KARINA, dan Kedepuitan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup melaksanakan FGD terkait uji coba implementasi New Urban Agenda di DKI Jakarta. Forum ini bertujuan untuk menerjemahkan NUA ke dalam konteks Jakarta, khususnya dalam membangun ketahanan kota yang berwawasan lingkungan lewat bidang kebencanaan dan lingkungan agar memudahkan dalam penyusunan prioritas isu dan pilihan kebijakan yang relevan dengan kondisi daerah. Secara khusus, forum ini juga bermaksud untuk mendapatkan masukan perbaikan untuk buku Panduan Praktis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

FGD ini dilakukan secara berseri mengingat pada buku 3 (tiga) terdapat dua isu utama. FGD pertama lebih berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan serta bagaimana mengelola kota yang berwawasan lingkungan. Sedangkan, tuntut FGD kedua lebih berfokus pada pengurangan dan pengelolaan risiko bencana serta perencanaan dan penerapan kebijakan kebencanaan dan perubahan iklim yang terpadu.

Bersambung ke Hal. 4 >>>

Visiting Fellowship Programme Centre for Liveable Cities di Singapura

Singapura, 13 - 15 Maret 2019, *Centre for Liveable Cities* (CLC) yang merupakan lembaga di bawah Kementerian Pembangunan Nasional Singapura yang mengadakan acara yang untuk bertujuan menyediakan wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman berskala global dalam mewujudkan kota yang “liveable”, “sustainable”, dan “resilient”. Proses berbagi pengetahuan dan

pengalaman di antaranya dilakukan melalui kuliah umum dengan mengundang pembicara tamu yang terdiri dari berbagai ahli, akademisi, serta pejabat tinggi pemerintah dan berasal dari berbagai kota lain di dunia, termasuk DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2019.

Bersambung ke Hal. 2 >>>



Source : Dokumentasi JakBer

Oswar Mungka selaku Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Chief Resilience Officer didampingi Dr. Johannes Widodo, Associate Professor, National University of Singapore (NUS) memberikan paparan mengenai upaya Jakarta dalam mewujudkan ketahanan kota.

>>> Visiting Fellowship Programme Centre for Liveable Cities di Singapura



Source : Dokumentasi JakBer

Selain menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, kegiatan *Visiting Fellowship* CLC juga memberi kesempatan bagi para pesertanya untuk belajar dari berbagai praktik unggulan (*best practices*) yang telah dilakukan oleh Singapura dalam menyelesaikan berbagai isu perkotaan yang dialami.

Beberapa praktik unggulan (*best practices*) yang dibahas dalam kegiatan tersebut di antaranya adalah: (i) Proses Pengembangan Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) di Singapura; (ii) Skema *Land Value Capture* (LVC) dan implementasi *Land Development Charge* (LDC) dalam kawasan TOD; dan (iii) Program *Social Housing* untuk para penduduk Lanjut Usia (Lansia).

Perencanaan Sistem Transportasi Terpadu di Singapura

Singapura juga pernah memiliki sistem transportasi umum yang kurang baik di saat awal kemerdekaannya (1960-1970). Menyadari hal tersebut, Singapura melakukan studi dan bersepakat untuk melakukan perencanaan kota dan perencanaan sistem transportasi secara terpadu. Untuk mengembangkan sistem transportasi umum yang baik, Singapura menemukan bahwa perlu untuk melakukan 3 (tiga) hal, yaitu: (i) Mengintegrasikan perencanaan dan sistem transportasi; (ii) Pengelolaan kepemilikan kendaraan pribadi yang mumpuni; dan (iii) Melakukan optimalisasi kapasitas jalan dan bukan penambahan ruas jalan. Saat ini, 65% dari seluruh perjalanan yang dilakukan di Singapura dilakukan dengan sistem transportasi umum (MRT, LRT, Sistem

transportasi umum (MRT, LRT, Sistem Pelayanan Berbasis Bus, dan Taksi). Pemerintah Singapura memiliki sasaran untuk menaikkan persentase tersebut hingga 75% di masa depan.

Perumahan Publik di Singapura

Pada awal pembangunannya, Pemerintah Singapura memiliki visi bahwa seluruh warga negara Singapura harus memiliki rumah. Langkah awal yang perlu dilakukan untuk menjamin pelaksanaan penyediaan rumah tersebut adalah akuisisi lahan oleh pemerintah untuk melaksanakan prosesnya. Selain itu, seluruh perumahan publik di Singapura melakukan skema kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) sehingga tanah dari perumahan publik tetap dimiliki oleh Pemerintah Singapura dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan yang akan dilakukan di masa depan. Saat ini, 95% warga negara Singapura telah memiliki rumah sendiri dan 5% lainnya menyewa rumah. Selain itu, 80% warga negara yang memiliki rumah tersebut tinggal di perumahan publik yang disediakan oleh *Housing Development Board* (HDB).

Pengembangan Lahan di Singapura

Pemerintah Singapura memberlakukan skema *Land Development Charge* (LDC) ketika pemangku kepentingan berkeinginan untuk membangun bangunan di Singapura. Skema LDC ini dilakukan dengan menilai luas lahan yang akan dibangun dengan luas bangunan yang akan terbangun. Dana yang didapat dari skema LDC ini akan menjadi dana tambahan bagi pemerintah Singapura dalam menyediakan fasilitas bagi warga Singapura di masa depan.

LDC ini ditetapkan berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi dan lokasi di Singapura. Besaran LDC juga diperbaharui setiap 6 (enam) bulan sekali. LDC ini akan membantu berbagai pemangku kepentingan di Singapura untuk mengidentifikasi besaran biaya yang diperlukan untuk membangun sesuatu sehingga semua hal bisa dilakukan secara transparan. Adapun sistem penjualan lahan ke pihak swasta oleh Pemerintah Singapura dilakukan dengan sistem yang sangat ketat. Penjualan tanah hanya bisa dilakukan jika pihak swasta memenuhi syarat total luas lantai yang harus dibangun yang sudah ditentukan oleh pemerintah Singapura. Pembeli harus memiliki pendanaan yang cukup dan mampu membayar harga tanah yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura dalam 90 hari. Proses pembelian lahan harus dilakukan melalui salah satu dari empat metode, yaitu: (i) Tender terbuka; (ii) Lelang Lahan; (iii) Tender terkait konsep rancangan dan biaya; dan (iv) Tender dengan biaya yang telah ditetapkan pemerintah Singapura (hanya konsep).

Pada kesempatan ini, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup selaku Koordinator Ketahanan Kota/*Chief Resilience Officer* (CRO) Jakarta Berketahanan melaksanakan sesi wawancara dengan pihak CLC yang mendiskusikan beberapa hal terkait isu utama Jakarta dan upaya yang telah dilakukan oleh DKI Jakarta.

Isu utama yang dihadapi oleh DKI Jakarta mayoritas menyangkut penyediaan layanan dasar untuk penduduk Jakarta yang berupa: penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan, dan penyediaan transportasi publik yang prima. Selain itu, masalah terkait belum optimal dan terintegrasinya pengerjaan program Pemprov DKI Jakarta dengan wilayah Metropolitan Jabodetabek juga menjadi salah satu perhatian bagi Jakarta. Menjawab kondisi tersebut DKI Jakarta telah membentuk beberapa forum yang bertujuan untuk mendapatkan konsensus atau komitmen dalam menyelesaikan masalah yang ada. Komitmen ini dituangkan dalam bentuk *grand design* yang diharapkan dapat menjadi strategi bersama dalam mengurai dan menyelesaikan masalah di Jakarta.

Dokumentasi Kegiatan



Sesi Wawancara dengan CLC



Kunjungan ke Pusat Kegiatan Publik Terpadu Our Tampines Hub (OTH)



Lunch meeting CLC dan mitra yang membantu pembangunan Singapura



Kunjungan ke *Housing and Development Board* (HDB) Hub/Toa Payoh Hub

Dilema Pelestarian Lingkungan (*Earth Hour*) dan Keberlangsungan Agenda Nasional 2019



Rabu, 27 Maret 2019 lalu Sekretariat Jakarta Berketahanan turut hadir pada pertemuan yang membahas agenda *Earth Hour* 2019 yang akan dilaksanakan pada 30 Maret 2019. Ada hal menarik dari pertemuan ini, karena ternyata agenda yang dilakukan sebagai upaya pelestarian lingkungan ini bertepatan pula dengan agenda Debat Calon Presiden RI yang juga akan dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019.

Earth Hour merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh WWF Indonesia untuk

meningkatkan kesadaran dan kepedulian berbagai pihak terhadap lingkungan yang dilakukan dalam bentuk pemadaman lampu dan/atau pengurangan konsumsi energi serentak selama 1 (satu) jam di seluruh dunia. Kegiatan pemadaman listrik akan dilakukan pada pukul 20.30 sampai 21.30 di seluruh dunia, karena pada waktu tersebut penggunaan energi listrik berada pada puncak tertinggi. Dengan begitu, pemadaman listrik diharapkan dapat memberikan efek yang signifikan pada lingkungan.

Selama 10 tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta selalu turut serta dalam kegiatan *Earth Hour* yang berkontribusi pada pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penggunaan energi demi melestarikan lingkungan. Akan tetapi, Pelaksanaan *Earth Hour* 2019 di Jakarta tahun ini akan sedikit berbeda karena difokuskan pada pemadaman listrik di beberapa ikon kota Jakarta (Monumen Nasional, Patung Pemuda, Patung Selamat Datang, Tugu Tani, Bundaran HI, Patung Pahlawan, Patung Jenderal Sudirman) dan Gedung Pemerintah

Pusat dan Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengeluarkan press release yang menekankan bahwa kontribusi DKI Jakarta dalam *Earth Hour* 2019 dilakukan dalam bentuk yang lain. Hal ini menjadi sangat penting karena agenda pelestarian hidup dan agenda Debat Calon Presiden RI merupakan 2 (dua) agenda yang sangat penting dan harus bisa berjalan secara beriringan.

Oswar Mungkasa selaku Deputy Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan *Chief Resilience Officer* Sekretariat Jakarta Berketahanan menekankan bahwa DKI Jakarta memiliki komitmen tinggi terkait pelaksanaan *Earth Hour* 2019 meskipun tidak melaksanakan pemadaman listrik secara masif. Pelaksanaan *Earth Hour* 2019 DKI Jakarta dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu: pemadaman listrik di beberapa ikon kota yang tidak mengganggu jalannya agenda nasional (Debat Calon Presiden RI). Upaya ini diharapkan menjadi *win-win solution* dan membuahkan hasil baik bagi semua pihak.

Seminar *Water as Leverage* - Menuju Semarang Tangguh melalui Pengelolaan Air Terpadu



Pada tanggal 13 Maret 2019, Jakarta Berketahanan ikut berpartisipasi sebagai peserta seminar "*Water as Leverage*": Menuju Semarang Tangguh melalui Pengelolaan Air Terpadu. Adapun seminar ini merupakan bagian dari kegiatan besar "*Water as Leverage for Resilient Cities: Asia*" yang diselenggarakan oleh Pemerintah kota Semarang sebagai tindak lanjut implementasi strategi ketahanan kota Semarang.

Kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah berbagi pengetahuan serta memberi kesempatan bagi pesertanya untuk belajar berbagai praktik unggulan (*best practices*) yang dilakukan oleh Semarang dalam menyelesaikan berbagai isu perkotaan yang dialami.

Seminar ini dihadiri oleh sekitar 100 orang peserta diantaranya BAPPEDA Kota Semarang, Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Kadin Kota Semarang, BAPPENAS, Kedutaan Pemerintah Belanda untuk Indonesia, ADB (*Asian Development Bank*), Bank Dunia (*World Bank*), WWF (*World Wide Fund*); akademisi, Komunitas dan LSM Lingkungan Hidup, serta kedua tim terpilih untuk desain pengelolaan air terpadu Kota Semarang.

Water as Leverage Semarang adalah bagian dari kegiatan "*Water as Leverage for Resilient Cities: Asia*" yang diusung oleh utusan khusus Kerajaan Belanda untuk urusan air internasional, Mr. Henk Ovink. Kegiatan ini merupakan upaya

untuk memperbaiki wilayah yang terdampak guncangan yang terinspirasi dari peristiwa badai *hurricane-Sandy* di *New York* dan *New Jersey*. Salah satu komponen kegiatan ini adalah kompetisi "*Rebuild by Design*".

Kegiatan ini juga diimplementasikan di wilayah Asia dengan tema "*Water as Leverage for Resilient Cities: Asia*". Kegiatan ini diselenggarakan di tiga kota di Asia yang memiliki persoalan air, yaitu Chennai (India), Khulna (Bangladesh) dan Semarang (Indonesia). Tujuan dari kegiatan kompetisi ini adalah untuk memfasilitasi terkait air di Kawasan perkotaan. Dari 39 tim Desain yang mengikuti kompetisi di ketiga kota tersebut, hanya ada 2 (dua) tim yang dipilih untuk setiap kota. Adapun seminar ini merupakan tahapan proses final pemberian masukan terhadap desain proyek yang dipresentasikan oleh kedua tim yang terpilih.

Dalam kegiatan ini Sekretariat Jakarta Berketahanan berkesempatan untuk berkenalan dan berjejaring dengan tim Semarang Berketahanan dan perwakilan tim desain pengelolaan air terpadu Semarang. Kepala BAPPEDA Kota Semarang, Dr. Bunyamin, M.Pd, juga bersedia diundang ke Jakarta untuk berdialog dan bertukar pikiran dengan *stakeholder* terkait dengan isu berketahanan. Ia berharap pengalaman Kota Semarang dapat menjadi pembelajaran dan mendapatkan dokumen Strategi Jakarta Berketahanan sebagai payung program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan kota yang berketahanan.

FGD Implementasi Panduan Praktis New Urban Agenda Di DKI Jakarta, Diskusi Pertama

Kamis, 21 Februari 2019, FGD pertama dilaksanakan. Pada kesempatan ini, terdapat tiga rangkaian acara antara lain: (i) pembukaan dan pemaparan awal mengenai buku panduan implementasi NUA dan gambaran kondisi di Jakarta, (ii) sesi diskusi kelompok, (iii) sesi presentasi kelompok.

Pada sesi pertama, acara secara resmi dibuka oleh Bapak Oswar Mungkasa selaku Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta. Pada kesempatan itu, disampaikan bahwa pelaksanaan FGD yang mempertemukan pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan merupakan langkah yang sangat penting. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan konsensus dan pemahaman yang sama mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan di Jakarta, termasuk dalam konteks pelaksanaan NUA. Karena pada dasarnya, NUA adalah kebijakan yang bersifat global dan berada pada konteks yang sangat umum dan luas. Sehingga diperlukan upaya penerjemahan yang sesuai dengan konteks lokal dan kondisi eksisting di masing-masing kota. Bapak Oswar Mungkasa juga menghimbau agar setiap peserta dapat berpartisipasi aktif dalam mengkritisi setiap pilihan kebijakan yang sudah dirumuskan pada Buku Panduan Implementasi NUA. Sehingga hasil dari diskusi tersebut dapat mendorong terwujudnya arahan kebijakan yang lebih konkret dan sesuai dengan konteks Jakarta.

Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemaparan secara lebih rinci mengenai Buku Panduan Implementasi NUA yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono Sarosa selaku *Chief Knowledge Worker* Ruang Waktu yang mempunyai andil besar dalam penyusunan Buku Panduan Implementasi NUA dan dilanjutkan oleh pemaparan terkait kondisi dan isu yang perlu diselesaikan di Jakarta oleh Ibu Vera Revina Sari selaku Asisten Deputi Bidang Tata Ruang Pemprov DKI.

Pada sesi kedua, para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan pilihan kebijakan yang ada pada Buku Panduan Implementasi NUA seri 3 terkait pembangunan lingkungan hidup yang mana berfokus pada upaya membangun kota yang berwawasan lingkungan. Pada sesi ini

terdapat beberapa masukan yang sangat penting dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan seperti penerapan *good governance* dan kemitraan yang harus menjadi landasan utama dan payung besar dalam setiap pelaksanaan kebijakan. Artinya, setiap program atau pilihan kebijakan yang ada harus mampu mendorong kerjasama antar *stakeholder* guna menciptakan dampak yang lebih besar. Termasuk kerjasama dan kemitraan yang mendorong inovasi baru dalam mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan hidup.

Setelah diskusi selesai, hasil koreksi, masukan, dan isu baru serta kebijakan yang diusulkan dipaparkan kembali pada sesi pemaparan kelompok. Hal ini dilakukan guna mengkritisi masukan yang ada dan mengambil inti sari dari setiap masukan untuk nantinya menjadi bagian dari pilihan kebijakan dan aksi yang ada pada Buku Panduan Implementasi NUA.



Source : Dokumentasi JakBer

FGD Implementasi Panduan Praktis New Urban Agenda Di DKI Jakarta, Diskusi Kedua



Source : Dokumentasi JakBer

Diskusi kedua dilaksanakan pada Jumat, 29 Februari 2019, rangkaian acara tidak terlalu berbeda. Perbedaan utama hanya pada isu yang didiskusikan. Jika dikelompokkan, masukan dari para peserta lebih berfokus pada bagaimana pemangku kebijakan dan *stakeholder* yang ada dapat memposisikan masyarakat sebagai kunci utama dalam membentuk ketahanan kota baik pada konteks adaptasi dan mitigasi bencana

ataupun perubahan iklim. Paradigma melibatkan masyarakat pada setiap tahapan perencanaan strategi pengurangan risiko bencana harus terus didorong. Pembuat kebijakan juga harus mengadaptasi *local knowledge* yang ada di masyarakat dengan menemukan skema mitigasi dan adaptasi yang ada dan berkembang di masyarakat lalu memperkuatnya dengan konsep yang sesuai. Dengan begitu, masyarakat akan dapat dengan mudah untuk belajar sehingga kapasitas dan pemahaman mereka dalam menghadapi masalah kebencanaan dan dampak dari perubahan iklim akan meningkat dengan cepat.

Masukan yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah dan *stakeholder* yang ada dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan efisien dalam memberikan informasi pada kondisi pra, saat, dan pasca kejadian bencana. Pemanfaatan teknologi ini dicontohkan oleh

Petabencana.id yang sedang menyusun program berbasis aplikasi dan pelaporan masyarakat lewat Twitter untuk menghimpun informasi dari masyarakat secara lebih presisi dan berbasis geospasial terkait kejadian bencana secara *realtime* yang nantinya dapat menjadi dasar informasi dalam penyusunan peta dan jalur evakuasi di kawasan yang rentan terhadap bencana. Harapannya penyusunan jalur evakuasi tidak lagi hanya berdasarkan informasi pada data dan peta 1 : 1000 seperti yang sekarang dilakukan, melainkan mampu memanfaatkan sisi kepekaan masyarakat dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan media sosial.

Hasil dari FGD ini juga diharapkan mampu memberikan masukan dan sudut pandang yang lebih konkret dan baru pada arahan kebijakan yang ada. Lebih dari itu, Peserta dapat memahami poin penting Panduan Praktis dalam rangka Implementasi NUA, khususnya di bidang kebencanaan dan lingkungan perkotaan dan dapat menjadikannya sebagai salah satu acuan dalam proses penyusunan kebijakan program yang akan dilakukan.

Portal Sekretariat Jakarta Berketahanan

Manajemen Pengetahuan Jakarta Berketahanan

Produk Sekretariat Jakarta Berketahanan

Laporan - Dokumentasi - Strategi



Laporan Bulanan
Sekretariat Jakarta Berketahanan
Bulan Maret 2019

Tautan Unduhan :

<http://jakberketahanan.org/2019/03/05/laporan-bulanan-sekretariat-jakarta-berketahanan-bulan-februari-2019/>



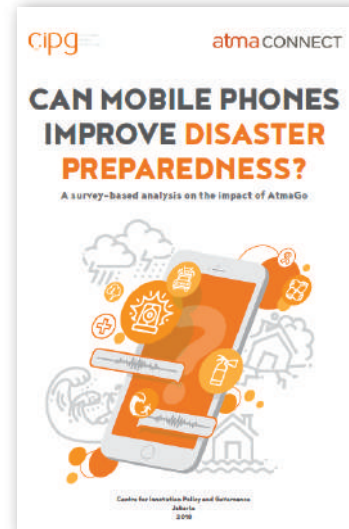
Penilaian Awal
Ketahanan/Preliminary Resilience
Assessment (PRA) Jakarta

Tautan Unduhan :

<http://jakberketahanan.org/2018/10/08/penilaian-awal-ketahanan-preliminary-resilience-assessment-pra-jakarta/>

Pustaka

Publikasi Terkait Ketahanan Kota



CAN MOBILE PHONES IMPROVE DISASTER PREPAREDNESS? A survey-based analysis on the impact of AtmaGo

Tautan Unduhan :

<http://jakberketahanan.org/2019/04/10/can-mobile-phones-improve-disaster-preparedness-a-survey-based-analysis-on-the-impact-of-atmago/>

Kliping

Kumpulan Berita Terkait Jakarta Berketahanan

Easing congestion to reduce air pollution in Jakarta

27 Maret 2019 | Link :

<http://jakberketahanan.org/2019/04/01/easing-congestion-to-reduce-air-pollution-in-jakarta/>

3 Kelurahan di Jakarta Utara Sulit Dapatkan Air Bersih

08 Feb 2019 | Link :

<http://jakberketahanan.org/2019/03/25/3-kelurahan-di-jakarta-utara-sulit-dapatkan-air-bersih/>

MRT Jakarta Fase 2 dan 3 Bakal Dikerjakan Paralel

21 Maret 2019 | Link :

<http://jakberketahanan.org/2019/03/25/mrt-jakarta-fase-2-dan-3-bakal-dikerjakan-paralel/>

PAM Jaya: 40 persen Warga Jakarta Belum Nikmati Air Bersih

21 Maret 2019 | Link :

<http://jakberketahanan.org/2019/03/25/pam-jaya-40-persen-warga-jakarta-belum-nikmati-air-bersih/>

How Grab Indonesia achieved decacorn status

04 Maret 2019 | Link :

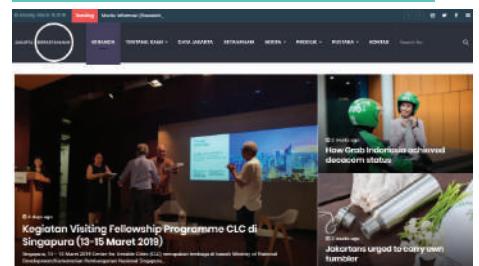
<http://jakberketahanan.org/2019/03/04/how-grab-indonesia-achieve-d-decacorn-status/>

Media Digital

Media Informasi Jakarta Berketahanan

Portal

Sekretariat Jakarta Berketahanan



SEKERTARIAT JAKARTA BERKETAHANAN

Gedung Balai Kota, Blok E, Lantai 4,
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9,
Jakarta 10110, Tel. (62-21) 389 01 802
Email : info@jakberketahanan.org,
Portal : www.jakberketahanan.org



Jakarta Berketahanan



JakBerketahanan



[jakberketahanan](https://www.instagram.com/jakberketahanan)